



**Program
SIAP SIAGA
Kemitraan Australia –
Indonesia dalam
Pengelolaan Risiko
Bencana
(AIP- DRM)**

**Reflection Report No. 1:
SIAP SIAGA Partner
Reflections on 2020
Program Results**



Disusun oleh:
Tim Program SIAP SIAGA

Oktober 2020

Publikasi ini didanai oleh Pemerintah Australia lewat Departemen Luar Negeri dan Perdagangan. Pendapat yang dikemukakan dalam publikasi ini adalah milik penulis sepenuhnya dan tidak serta-merta merepresentasikan pendapat Pemerintah Australia

 Daftar Isi

Ringkasan Lokakarya	Error! Bookmark not defined.
Latar Belakang dan Tujuan Lokakarya	Error! Bookmark not defined.
Presentasi dan Diskusi Hasil Tengah Tahun 2021	6
Sesi Sambutan dan Pengantar	Error! Bookmark not defined.
Sesi Breakout Group Discussion	7
Grup 1: Operasionalisasi Kebijakan dan Manajemen Informasi Data	7
Grup 2: Pelibatan, Komunikasi dan Pertanggungjawaban Masyarakat	8
Grup 3: Koordinasi dan Pelibatan Pemangku Kepentingan	10
Masukan Pleno dan Tindak Lanjut	12
Langkah Selanjutnya	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 1: Agenda	13
Lampiran 2: Peserta	14
Lampiran 3: Slide Presentasi	17



Ringkasan Lokakarya

Lokakarya Refleksi Mitra SIAP SIAGA diselenggarakan oleh Tim SIAP SIAGA dan dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2020 melalui Zoom. Selama berlangsungnya Program, SIAP SIAGA telah bekerja sama dengan mitra program menggunakan pendekatan PDIA untuk mencari informasi dan masukan terkait hasil kegiatan dan kontribusinya atau dampaknya terhadap Teori Perubahan Program. Lokakarya Refleksi menyediakan forum untuk menilai secara kritis hasil kegiatan dan memberikan rekomendasi kepada Program SIAP SIAGA terkait apa yang berjalan, apa yang tidak, jalur atau peluang yang muncul dan untuk memberikan panduan tentang manajemen risiko. Tujuan dari lokakarya ini adalah untuk berbagi temuan dan pembelajaran utama dari tahun pertama program dan untuk mendiskusikan implikasi bagi program ke depannya.

Peserta lokakarya berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Sosial (Kemensos), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Timur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali, Badan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Jawa Timur, Badan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Nusa Tenggara Timur, Badan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Bali, Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISMPMD DUKCAPIL) Provinsi Bali; Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali; dan Mitra Hibah SIAP SIAGA: LPBI NU, MDMC, Mitra Hibah SIAP SIAGA GESI: ADRA Indonesia, PTD Consortium Ademos, YABIKA NTT dan Yayasan Gaya Dewata Bali, RedR Australian serta berbagai LSM lokal dari Bali, NTT dan Jawa Timur sekaligus akademisi dari Universitas Diponegoro.

Lokakarya diawali dengan Sambutan dan Pengantar dari Louis Henley - Sekretaris Pertama (Kerja sama Pembangunan) Kedutaan Besar Australia, Udrekh Hanif - Direktur Sistem Manajemen, BNPB, Dr. Safrizal Za, Direktur Jenderal Unit Pengembangan Administrasi Wilayah di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan, presentasi linimasa dan dukungan bidang utama yang diberikan oleh SIAP SIAGA pada tahun pertama oleh Lucy Dickinson – Ketua Tim SIAP SIAGA, Diskusi Kelompok Breakout yang meninjau temuan utama dari kegiatan SIAP SIAGA dan perspektif mitra terhadap hasil.

Hasil lokakarya membantu memvalidasi teori perubahan SIAP SIAGA, dan bersama dengan pemetaan hasil kegiatan SIAP SIAGA 2020, menjadi dasar untuk Rencana Kerja Tahunan program untuk tahun 2021.



Latar Belakang dan Tujuan Lokakarya

Meskipun Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan dalam mengembangkan kapasitas pengelolaan risiko bencana (DRM), masih ada kebutuhan untuk melanjutkan upaya penguatan struktur pengelolaan risiko bencana dan koordinasi antara aktor negara dan non-negara. Dimulai pada November 2019, Program SIAP SIAGA didanai oleh Pemerintah Australia, melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) dan dikelola oleh Palladium. Bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), SIAP SIAGA berfokus pada peningkatan kemampuan Indonesia untuk mencegah, mempersiapkan, merespons, dan pulih dari bencana yang terjadi secara cepat dan lambat.

Program SIAP SIAGA berusaha untuk memahami sebab dan akibat dari perubahan dalam sistem manajemen bencana dan untuk mengembangkan tindakan yang mengatasi kendala utama dan meniru praktik terbaik. Program ini menggunakan pendekatan adaptif yang menempatkan pembelajaran dan manajemen pengetahuan sebagai inti dari strategi implementasinya. Program ini bertanggung jawab untuk mencapai hasil akhir program (EOPO) berikut:¹

1. Sistem penanggulangan bencana diperkuat untuk membangun kesiapsiagaan nasional dan memberikan layanan penanggulangan bencana di tingkat daerah;
2. Memperkuat kerja sama antara Australia dan Indonesia dalam kesiapsiagaan dan respons kemanusiaan regional.

Program ini bertujuan untuk mencapai tujuannya dan berkontribusi pada pengelolaan risiko bencana yang lebih efektif di Indonesia dengan mengatasi kondisi berikut:

- **Koherensi sistem:** memahami bagaimana bagian-bagian yang sudah ada berinteraksi (atau tidak berinteraksi) dengan satu sama lain, di mana celah dan tumpang tindihnya.
- **Koordinasi dan kejelasan sistem:** memahami hubungan dan protokol komunikasi antara berbagai bagian sistem, dan antara berbagai tingkat pemerintahan di dalam sistem.
- **Komunikasi** di internal pemerintah dan dengan masyarakat: memahami keandalan dan ketepatan waktu informasi terkait bencana, termasuk petunjuk tentang cara menggunakan informasi tersebut.

Tujuan dari Lokakarya Refleksi adalah sebagai berikut:

1. Untuk merefleksikan hasil pelaksanaan kegiatan, peluang, masalah atau tantangan apa yang muncul yang dapat dipelajari oleh SIAP SIAGA dan mitranya, dan bagaimana hasil kegiatan berkontribusi pada tujuan SIAP SIAGA serta mitra, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat sekitar.
2. Untuk merefleksikan apa yang berjalan dengan baik dan peluang serta hambatan apa yang muncul untuk pelaksanaan program yang sedang berlangsung; dan
3. Untuk membahas wawasan, persepsi atau rekomendasi terkait jalur yang teridentifikasi, dan jalur baru yang potensial, bagi Program SIAP SIAGA untuk mencapai Hasil Akhir Program.



Presentasi dan Diskusi Hasil Tengah Tahun 2021

Sesi Sambutan dan Pengantar

Lokakarya diawali dengan Sambutan oleh **Louis Henley – Sekretaris Pertama (Kerja Sama Pembangunan) Kedutaan Besar Australia**. Beliau menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti lokakarya dan memberikan masukan sesuai dengan keahlian masing-masing terhadap program. Beliau menjelaskan tentang pendekatan Adaptif program SIAP SIAGA dan tujuan lokakarya sebagai momen refleksi setelah tahun pertama program untuk melihat apa yang berjalan dan apa yang tidak serta apa yang paling berharga bagi program untuk terus berfokus pada sumber daya untuk program SIAP SIAGA 2021. Beliau berharap dengan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan, sejumlah peran dan aktor kunci dapat diidentifikasi dalam pengelolaan risiko bencana dengan melihat secara kolektif koherensi sistem, kejelasan peran dan tanggung jawab sistem serta komunikasi pada sistem penanggulangan bencana. Kemudian beliau berharap semua pemangku kepentingan bersama-sama dapat mengidentifikasi apa poin terbaik yang dapat didukung Pemerintah Australia untuk membantu sistem lebih mampu mewujudkan potensi dan secara kolektif melayani masyarakat yang terkena dampak bencana di Indonesia.

Lokakarya kemudian dibuka oleh **Udrekh Hanif, Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNBP**. Beliau mengakui peran penting LSM, terutama dalam kesiapsiagaan DRM nasional dalam hal mendukung sumber daya (manusia) pemerintah – seperti yang terlihat dalam upaya respons COVID-19, menuju upaya perubahan perilaku pencegahan dan penanganan kasus COVID-19. Beliau sangat menantikan acara berbagi pengetahuan ini untuk menjembatani mata rantai yang hilang, belajar dari tiga provinsi percontohan untuk menyoroti pelajaran utama. Acara ini sangat penting, terutama untuk mendukung kegiatan SIAP SIAGA meningkatkan kesiapsiagaan dan memberikan solusi untuk kemacetan, mengurangi kesenjangan yang ada, dan berfungsi sebagai penghubung strategis. Lebih lanjut, beliau berharap nantinya kerja sama ini dapat menghasilkan policy brief untuk lebih mendukung pemerintah, baik dalam identifikasi maupun pemecahan masalah.

Dr. Safrizal Za, Dirjen Bina Tata Usaha Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI kemudian memberikan sambutan dan menyampaikan apresiasi atas dukungan SIAP SIAGA kepada Kemendagri khususnya dalam upaya penanggulangan COVID-19, dan bangga dengan berbagai produk yang dihasilkan kementeriannya dan SIAP SIAGA – berbagai kebijakan dan pedoman penting bagi pemerintah daerah. Ini merupakan dukungan penting bagi Kemendagri. Selama ini berbagai pedoman penting yang dihasilkan telah dibawa Mendagri ke pertemuan-pertemuannya dengan gubernur dan walikota: 1) Pengarusutamaan GESI, 2) Penguatan sistem informasi/dasbor Pemerintah Pusat-Pemda, yang sangat bermanfaat dan telah dibagikan dengan 548 pemerintah kabupaten -- dasbor eksekutif yang berisi informasi dan analisis kunci untuk digunakan oleh staf kunci dan pemimpin daerah, dan 3) pedoman COVID-19, standar pelayanan minimum (SPM) dan penanggulangan bencana untuk pemerintah daerah, 4) pedoman COVID-19 (pencegahan, pengendalian, diagnosis, pengelolaan), dan 5) pedoman masyarakat produktif selama masa pandemi. Selain itu, beliau menekankan pentingnya Kemendagri dan SIAP SIAGA untuk mendukung implementasi dan pencapaian SPM utama penanggulangan bencana, dan jika memungkinkan, berkolaborasi dengan kota/negara lain untuk memperkenalkan model terbaik yang dapat berjalan. Beliau juga mengakui bahwa selama ini upaya perencanaan pembangunan Indonesia belum terlalu fokus pada investasi DRM. Oleh karena itu, Kemendagri sangat mendorong hal ini melalui dukungan yang diperluas terhadap penggunaan Indeks Risiko dan Indeks Bencana di tingkat lokal. Beliau juga menegaskan dukungannya yang berkelanjutan terhadap implementasi program SIAP SIAGA.

Lucy Dickinson, Ketua Tim SIAP SIAGA, kemudian memberikan gambaran tentang tujuan dan kegiatan SIAP SIAGA di tahun 2020 (Silakan lihat Lampiran 3). Hasil kegiatan SIAP SIAGA di

empat program kerja telah dianalisis dan bidang tematik telah muncul. Sesi breakout untuk setiap area tematik (total tiga) kemudian dilakukan.

Sesi Breakout Group Discussion

Grup 1: Operasionalisasi Kebijakan dan Manajemen Informasi Data

Diskusi kelompok ini didasarkan pada temuan kunci berikut dari kegiatan SIAP SIAGA:

Operasionalisasi Kebijakan

- Tidak adanya mekanisme formal untuk mengoordinasikan penanggulangan bencana lintas sektor – menyebabkan kurangnya koherensi dan implementasi kebijakan.
- Pemahaman terhadap kebijakan atau komunikasi kebijakan dan konsistensi pedoman untuk mengoperasionalkan kebijakan – menyebabkan penafsiran dan ketidakselarasan dalam implementasi.
- Kapasitas pemerintah pada tingkat yang berbeda (sumber daya manusia, keuangan, kepemimpinan) – prioritas, alokasi sumber daya, dan implementasi yang berbeda.
- Kurangnya investasi dalam kebijakan berbasis data (terkait dengan temuan tentang manajemen informasi)
- Partisipasi multi-sektor dalam pengembangan dan implementasi kebijakan – yaitu: klaster sistem, platform multi-sektor.

Manajemen informasi

- Kapasitas di pemerintahan untuk pengumpulan dan analisis data serta informasi/aliran dan proses data yang tidak jelas (terkait dengan koherensi kebijakan).
- Kesenjangan dalam penyebaran dan akses informasi – internal Pemerintah dan eksternal/publik.
- Relevansi dan akurasi data – termasuk varians data dan penyebaran ketersediaan data.
- Kurangnya kapasitas untuk menggunakan mahadata dalam pengelolaan informasi dan pembuatan kebijakan.
- Mengoptimalkan teknologi dan kekurangannya.

Masukan dari Peserta:

- Terkait pengelolaan data dan informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bali menggunakan perangkat berbasis teknologi, bekerja sama erat dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan 19 jaringan hotel, dalam rangka penataan dan pengelolaan upaya karantina dan isolasi di Bali. Dengan demikian, Bali telah mampu mengintegrasikan teknologi dalam respons pemerintah, dengan menggunakan pendekatan berbasis aplikasi, serta digitalisasi input data.
- Dalam konteks UU Desa, sistem informasi desa (harus) terintegrasi dengan data penanggulangan bencana dan terhubung ke server kabupaten. Hal ini akan menciptakan arus data-informasi yang lancar antara pemerintah tingkat desa, kabupaten, provinsi dan nasional.
- Upaya pelibatan pemangku kepentingan non-pemerintah, multi-sektor untuk mendukung pemerintah juga telah membantu pemerintah, karena pemerintah dapat memperoleh manfaat dari berbagai dukungan teknis dari pemangku kepentingan non-pemerintah.
- Tentang pengelolaan kebijakan pandemi, data-informasi, dan perubahan perilaku, penting untuk dipahami bahwa publik merupakan pemangku kepentingan yang paling penting.
- Pada upaya perubahan perilaku, terlihat bahwa tingkat kepatuhan hanya mencapai antara 30-40% untuk berbagai protokol, dan jumlah penularan dan kasus aktif terus meningkat

secara signifikan, meskipun penerapan PSBB berulang yang tidak lagi efektif untuk perubahan perilaku.

- Ada masalah ketidakpercayaan publik yang perlu ditangani – ini adalah masalah mendasar yang berkontribusi pada rendahnya tingkat kepatuhan terhadap berbagai protokol pemerintah.
- Kelemahan dari intervensi COVID-19 secara keseluruhan dari aktor pemerintah dan non-pemerintah tampaknya adalah kurangnya energi untuk menjangkau demi memastikan bahwa informasi penting diteruskan ke publik. Hal ini menimbulkan persepsi publik yang berbeda dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk meruntuhkan kepercayaan kepada pemerintah, misalnya penyebaran hoaks bahwa vaksin berbahaya.

Berdasarkan diskusi dalam kelompok break-out, para peserta menyoroti beberapa poin yang perlu ditingkatkan:

- Perbedaan data antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten
- Membuat Sistem Informasi Desa yang terintegrasi dengan data terkait informasi bencana termasuk pemutakhiran data secara optimal.
- Arus informasi data perlu dilakukan secara cepat oleh semua pihak.
- Perbaikan cara penyampaian informasi oleh Pemerintah kepada masyarakat.
- Kebijakan nasional tentang kebencanaan harus dimasukkan dalam kurikulum pendidikan sejak usia dini hingga universitas dan secara informal di masyarakat.

Menurut peserta, ada beberapa tindakan yang perlu dihentikan:

- Sistem informasi/pendidikan yang tidak menjangkau masyarakat sehingga tidak dapat mengubah perilaku masyarakat.
- Kesalahan informasi: kelancaran informasi yang mempengaruhi kualitas kebijakan
- Bahasa yang digunakan untuk menyebarkan informasi/edukasi tidak membumi dan tidak mudah dipahami oleh masyarakat

Grup 2: Pelibatan, Komunikasi dan Pertanggungjawaban Masyarakat

Diskusi kelompok ini didasarkan pada temuan kunci berikut dari kegiatan SIAP SIAGA:

Pelibatan Masyarakat

- Penggunaan sistem klaster yang tidak efisien untuk meningkatkan masukan dari masyarakat sipil ke dalam pembuatan kebijakan dan memperkuat ketahanan di desa dan rumah tangga. Perempuan, kelompok yang terpinggirkan dan rentan harus secara proaktif terlibat dalam pertemuan dan tempat pengambilan keputusan lainnya.
- Definisi gender yang dangkal (dan terlalu berfokus pada perempuan, mengabaikan kompleksitas gender dan kelompok rentan lainnya) mempengaruhi rencana pembangunan pemerintah untuk dapat mencakup dan memenuhi kebutuhan perempuan dan kelompok rentan secara bermakna.
- PRBBK diperlakukan sebagai proyek jangka pendek padahal membutuhkan keterlibatan masyarakat jangka panjang dan perlu diperlakukan sebagai proses untuk mencapai hasil yang berkelanjutan. Hal ini perlu diintegrasikan ke dalam UU Desa, dan diselaraskan dengan peraturan Kemendagri, agar dapat menjadi bagian dari rencana/strategi pembangunan desa.
- Sebagai bagian dari masyarakat, korps sukarelawan seperti Tagana memungkinkan jangkauan yang lebih luas dan lebih dekat kepada masyarakat dalam upaya pengurangan bencana.

Komunikasi dan Pertanggungjawaban

- Komunikasi terjebak dalam birokrasi prosedural, termasuk akses informasi di berbagai media/metode dan pesan-pesan komunikasi yang dapat dicerna oleh publik. Ada kebutuhan mendesak untuk memperjelas kebijakan, sistem dan tanggung jawab pelaku penanggulangan bencana (pemerintah dan non-pemerintah) dalam input dan penggunaan sistem informasi tersebut.
- Risiko kesadaran rumah tangga masih rendah karena informasi tidak dirumuskan dengan cara yang meningkatkan kesadaran risiko dan mendorong perubahan perilaku.
- Kesenjangan penyebaran dan akses informasi menyebabkan perubahan perilaku yang tidak memadai untuk pengurangan risiko di masyarakat. Misalnya, metode sosialisasi Kajian Risiko Bencana harus dibedakan untuk pemerintah dan masyarakat serta mencakup pengetahuan/bahasa lokal.
- Siklus umpan balik (mekanisme akuntabilitas/pengaduan) tidak standar dan transparan. Masyarakat harus lebih sadar akan hal itu dan mengapa serta bagaimana menggunakanannya.

Masukan dari Peserta:

Pelibatan Masyarakat

- Literasi kebencanaan harus terus diperkuat agar masyarakat memahami isu-isu utama kebencanaan dan menumbuhkan kesadaran untuk berpartisipasi aktif dalam penanggulangan bencana.
- Sistem klaster dinilai kurang atau tidak efektif dalam memfasilitasi kebijakan dan perencanaan yang inklusif karena sistem klaster hanya memberikan informasi tentang semua pelaku dalam penanggulangan bencana. Ternyata para pelaku penanggulangan bencana belum memiliki kepedulian yang sama. Beberapa pelaku lebih fokus pada tata kelola dan yang lainnya lebih fokus pada tanggap bencana.
- Dokumen kebijakan dan perencanaan penanggulangan bencana belum disusun secara partisipatif, bahkan lebih banyak mengandung proses teknokratis. Akibatnya, tidak aplikatif dan minim partisipasi masyarakat.
- Komunikasi risiko bencana akan efektif jika dikemas dalam pesan yang menarik, mudah dicerna dan konsisten. Selain itu, perlu adanya dukungan untuk perubahan perilaku dan pemilihan media yang efektif untuk melakukan komunikasi risiko.
- Kesetaraan gender dan inklusi sosial akan dapat dilaksanakan dan dipastikan jika ada pemahaman yang memadai tentang Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana, terutama prinsip-prinsip kemanusiaan seperti tidak ada yang tertinggal dan tidak merugikan, serta akuntabilitas.
- Penanggulangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) sebagai upaya penguatan ketahanan masyarakat tidak dapat dicapai melalui proses instan, tetapi membutuhkan sumber daya yang besar. Selain harus didukung oleh kebijakan (peraturan, perencanaan dan pendanaan), juga harus menggunakan pendekatan religi dan kearifan lokal, tidak cukup hanya pendekatan sains.
- Setiap potensi dukungan untuk pelaksanaan PRBBK harus dimanfaatkan, seperti integrasi penilaian risiko bencana ke dalam rencana pembangunan, potensi dana desa dan SPM. Meski praktiknya tidak mudah, masing-masing memiliki tantangan yang tidak mudah dihadapi.
- Masih kurangnya libatatan masyarakat karena data yang tidak valid dan lama (jumlah penyandang disabilitas, lanjut usia, anak-anak, dan kelompok rentan tidak tercatat dengan baik). Ini akan menjadi masalah serius, karena kelompok rentan menjadi kurang diperhatikan dan tidak terjangkau oleh program.

- Keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat penting, karena mereka dihormati oleh masyarakat setempat. Ditemukan bahwa penanganan respons COVID-19 oleh tokoh-tokoh ini di tingkat lokal lebih efektif.
- Ada ruang yang luas untuk keterlibatan masyarakat, dengan kelompok rentan yang digunakan sebagai pendukung lokal, bagaimana mereka menjadi aktor penting dalam masyarakat bukan hanya penerima manfaat dukungan.

Komunikasi dan Pertanggungjawaban

- Komunikasi yang terjalin selama ini belum mampu mendukung koordinasi yang efektif. Masih banyak hambatan komunikasi, baik di lingkungan Pemerintah, apalagi dengan aktor di luar pemerintahan.
- Komunikasi harus didasarkan pada memperlakukan para pihak sebagai mitra strategis. Selain itu, mekanisme koordinasi formal yang disepakati oleh para pihak diperlukan untuk memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing pihak serta mendukung sinergi dan kolaborasi.
- Komunikasi yang efektif akan mendukung akuntabilitas. Diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk memperkuat pemahaman terhadap isu-isu mendasar penanggulangan bencana berdasarkan komitmen yang kuat, sehingga dapat menghasilkan respons atau umpan balik yang berkualitas.
- Dukungan sistem informasi yang mampu menjangkau sebanyak mungkin pihak juga penting untuk menciptakan akuntabilitas. Tanpa akuntabilitas, partisipasi publik akan sulit dibangun.
- Hal utama dalam akuntabilitas adalah kejelasan komitmen dan dukungan yang diberikan oleh individu atau lembaga, dan publik juga dapat meminta pertanggungjawaban pelaksanaannya. Pemberi dukungan dan komitmen harus memberikan dukungan yang berkualitas, masyarakat harus mampu memberikan umpan balik secara bertanggung jawab

Grup 3: Koordinasi dan Pelibatan Pemangku Kepentingan

Diskusi kelompok ini didasarkan pada temuan kunci berikut dari kegiatan SIAP SIAGA:

Koordinasi

- Berlanjutnya ego sektoral dan berlanjutnya pendekatan terselubung dalam penanggulangan bencana.
- Perlu kejelasan peran, tanggung jawab dan proses aktor pemerintah dan non-negara untuk manajemen bencana yang lebih efektif.
- Kurangnya mekanisme formal untuk mengoordinasikan penanggulangan bencana lintas sektor di luar tanggap bencana dan pemulihan. Tahap kesiapsiagaan bahkan lebih buruk?
- Tidak adanya proses bisnis atau rantai komando yang jelas dalam pelaporan dan pemutakhiran data dari tingkat provinsi hingga nasional, yang menghambat koordinasi yang efektif dan pengumpulan data yang akurat.

Pelibatan Pemangku Kepentingan

- Penggunaan sistem klaster yang tidak efisien untuk memanfaatkan masukan masyarakat sipil dalam pembuatan kebijakan dan memperkuat ketahanan di tingkat desa dan rumah tangga.
- Perlu memahami insentif dan disincentif organisasi masyarakat sipil untuk berkomitmen pada klaster masing-masing.
- Komunikasi terjebak dalam birokrasi prosedural dan tidak menutup loop umpan balik. Informasi gagal menjangkau masyarakat akar rumput, terutama mereka yang berasal dari kelompok rentan dan terpinggirkan.

Masukan dari Peserta:

- Masalah utamanya adalah kepemimpinan yang lemah, baik di tingkat institusi maupun individu. Koordinasi yang buruk adalah produk dari kepemimpinan dan tata kelola yang buruk.
- Terdapat ketidakjelasan dalam koordinasi dan komunikasi antar kementerian/lembaga pemerintah. Kementerian/Lembaga berkomunikasi secara individual, tidak ada kesatuan suara.
- SOP di kementerian tidak jelas, siapa melakukan apa, sampai sejauh mana, misalnya dalam hal pemberian izin.
- Koordinasi sumber daya hanya fokus pada pemerintah pusat, fungsi BPBD belum optimal.
- Rantai komunikasi hanya terjadi di tingkat atas, tidak sampai departemen daerah yang relevan.
- Dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan pemerintah, organisasi masyarakat sipil tidak terlibat secara aktif (misalnya, dalam klaster bencana). LSM hanya dianggap sebagai relawan, sedangkan organisasi seperti Muhammadiyah dan NU juga berperan sebagai penyedia layanan dengan serangkaian rumah sakit dan sekolah.
- Departemen pemerintah daerah kurang aktif dalam menangani COVID-19, dengan sebagian besar inisiatif berasal dari Sekda.
- Ego sektoral yang berdampak pada pembuatan peraturan pemerintah saat ini tidak sepenuhnya mencerminkan imparsialitas dalam upaya pencegahan pandemi COVID-19, terutama dalam hal pengurangan penularan dan kematian, bukan ekonomi. Akibatnya, terjadi kerancuan dan konflik kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19.
- Kemampuan sumber daya manusia serta organisasi pemerintah dan non-pemerintah dalam hal penanggulangan bencana masih lemah dan bervariasi di setiap daerah. Tidak semua pihak dapat menangani masalah krisis, menyiapkan sistem, dan membangkitkan kepemimpinan untuk mengatasi krisis bencana.
- Perlu mempertimbangkan perbedaan kapasitas antardaerah dalam kebijakan pemerintah, mengingat tidak ada satu solusi untuk semua masalah. Misalnya, kapasitas pemerintah daerah dalam hal penyiapan analisis risiko bencana, rencana keadaan darurat dan instrumen lainnya masih terbatas.



Masukan Pleno dan Tindak Lanjut

Sesi pleno membawa semua peserta kembali ke kelompok yang lebih besar, dengan temuan utama yang dilaporkan kembali dari setiap sesi breakout. Berikut ini adalah wawasan dan pesan menyeluruh yang muncul dari lokakarya:

- Kearifan lokal dinilai efektif dalam meningkatkan kesadaran/perubahan perilaku masyarakat, mis. masyarakat Bali menaati pecalang karena memiliki aturan yang jelas.
- Sistem klaster sangat penting, namun belum dipahami dengan baik oleh semua pelaku, dengan koordinasi sistem klaster di tingkat nasional dan daerah masih rendah.
- Informasi dan komunikasi sangat penting untuk menentukan kebijakan lokal, mekanisme libatkan masyarakat dan untuk meningkatkan ketahanan di tingkat masyarakat.
- Pemutakhiran data dan informasi merupakan suatu keharusan dan harus jelas di antara masing-masing pihak yang akan membagikan/memperbarui informasi tersebut.
- Penting untuk mengikutsertakan perspektif gender dalam semua manual/pedoman.

Langkah Selanjutnya

1. Perlunya peningkatan kapasitas dalam manajemen krisis bencana dan kepemimpinan bagi para pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah.
2. Fasilitasi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan daerah agar sejalan dengan kebijakan di tingkat pusat, termasuk dukungan teknis kepada pemerintah daerah terkait penyusunan KRB, RPKB, dan Rencana Kontinjenensi.
3. Perlu Penekanan untuk memperkuat sistem klaster guna meningkatkan Koordinasi dan Pelibatan Pemangku Kepentingan.
4. Perlu adanya program pengembangan sistem komunikasi dan peningkatan sistem informasi vertikal (pemerintah pusat-daerah) dan horizontal (pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat), termasuk sistem pelaporan.
5. Pesan saja tidak cukup; sistem TI pemerintah harus dapat mendukung pemantauan dan evaluasi kegiatan perubahan perilaku.

Lampiran 1: Agenda

Lokakarya Refleksi SIAP SIAGA
Kamis 8 Oktober 2020, jam 9 pagi sampai 11 pagi
Konferensi Video Zoom

Tujuan lokakarya: Untuk berbagi temuan dan pembelajaran utama dari Tahun 1 program dan untuk mendiskusikan implikasi bagi program ke depan.

Tempat: Zoom Meeting

Waktu	Sesi	Deskripsi Sesi	Rincian
09.00	Sambutan dan Pengantar	Pengenalan acara Sambutan: Dr. Udrek, Direktur Sistem Penanggulangan Bencana, BNPB Louis Henley, Sekretaris Pertama (Kerja sama Pembangunan), Kedutaan Besar Australia	Pak Said Faisal, Fasilitator Dr. Udrek, Direktur Sistem Penanggulangan Bencana, BNPB Louis Henley, Sekretaris Pertama (Kerja sama Pembangunan), Kedutaan Besar Australia
09.15	Sekilas tentang SIAP SIAGA tahun pertama	Presentasi limimasa, dan bidang dukungan utama.	Lucy Dickinson, Ketua Tim, SIAP SIAGA
09.30	Kerja kelompok: 3 Kelompok Breakout	Setiap sesi break out akan mempresentasikan / mendiskusikan: a) Temuan utama dari SIAP SIAGA b) Perspektif mitra c) Diskusi kelompok: i) Refleksi atas temuan utama dan ii) Apa yang harus terus dilakukan, dihentikan, atau dilakukan oleh SIAP SIAGA?	<i>Grup 1: Operasionalisasi kebijakan dan manajemen informasi</i> <i>Grup 2: Pelibatan, Komunikasi dan Pertanggungjawaban Masyarakat</i> <i>Grup 3: Koordinasi dan pelibatan multi-pemangku kepentingan</i>
10.15	Diskusi Pleno	Presentasi 5 menit kembali ke pleno untuk masing-masing kelompok. T&J dan diskusi umum	
10.55	Penutupan		

Annex 2: Participants

No	Name	Sex	Institution	Position
1	Agatia Wenan Tyawati	F	SIAP SIAGA	Disability and Safeguarding Adviser
2	Agung Wicaksono	M	BNPB	Analisis bencana
3	Agus Wibowo	M	BNPB	Direktur PSPB
4	Ahmad M Alim	M	Muhammadiyah	Vice Chief of MCCC
5	Akhmad Raditya Maulana Fajrin, S.T., M.Ars	M	BAPPEDA PROV JATIM	STAF SUBBID INFRASTRUKTUR KECIPTAKARYAAN DAN KEWILAYAHAN
6	Anggraeni Puspitasari	F	SIAP SIAGA	DRM Area Coordinator - Bali
7	Anggun Gunadi Priyo Sudarmo	M	Association of Resiliency Movement	Sekretaris
8	Anna Yulia	F	ADRA Indonesia	Project Manager
9	Antonius Y.EFI	M	YABIKAU NTT	Program Manejer
10	Apriliana Pipin	F	PSKBS-Pipin	Staff
11	Aria Mariany	F	SIAP SIAGA	Risk Planning Specialist
12	Asfirmanto Adi	M	BNPB	Analisis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
13	Bachtiar Dwi Kurniawan	M	MDMC (Muhammadiyah Disaster Management Centre)	Manajer Program GETAPAK
14	Bandung Djatmiko, ST, MSi	M	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Jatim	Kasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
15	Buce Ga	M	Forum PRB Provinsi NTT	KETUA
16	Budi Santoso	M	MDMC PP	Koordinator PRB MDMC
17	Catur Sudarmanto	M	FPRB JATIM	Sekjen
18	D Karlo Purba	M	ADRA Indonesia	Program Director
19	Dadang Iqwandy	M	BPBD Jatim	Kasi Pencegahan
20	Danang Insita Putra, PhD	M	Kemendagri	Kasi Informasi Bencana
21	Deni Misa	M	YABIKAU NTT	
22	Denika Blacklock	F	SIAP SIAGA	Head of Performance, Knowledge and Learning
23	Dewa Putu AM	M	SIAP SIAGA	Data IM Consultant
24	Diah Lenggogeni	F	Bappenas	Kasubdit Penanganan Bencana
25	Diana Pardosi	F	SIAP SIAGA	Finance and Administration Officer
26	Dinda Tungga Dewi	F	CMM Translation	Interpreter
27	Dinsos P3A Bali	M	Provinsi Bali	
28	Diyah Perwitosari	F	SIAP SIAGA	Program Policy Officer-Bali
29	Dodi Paridok	M	Yayasan Gaya Dewata	Kordinator Lapangan
30	Drs. Sintus Karolus	M	BPBD PROV.NTT	KA BID PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
31	Dwi Jatmiko	M	SIAP SIAGA	Grants Coordinator
32	Dzar Al Banna	M	MDMC PP Muhammadiyah	Admin Getapak MDMC

No	Name	Sex	Institution	Position
33	Ester Margaretha	F	Saraswati	Project Manager
34	Ever	M	Bappelitbangda Prov.NTT	Staf
35	Fajar Shidiq	M	SIAP SIAGA	PPO East Java
36	Goolda Siahaan	M	SIAP SIAGA	Monitoring and Reporting Coordinator
37	Heniwati Wahyu	F	MDMC	Div. PRBK MDMC
38	Hermani Wahab	M	Bappenas	Perencana Ahli Utama
39	I Dewa Made Ardana	M	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	Sekretaris
40	I Gede Arya Sena	M	Majelis Desa Adat Provinsi Bali	Patengen Agung (Bendahara Umum)
41	I Made Karya	M	Yayasan Gaya Dewata	Manajer Program
42	I Made Rentin	M	BPBD PROVINSI BALI	KALAKSA
43	I Nengah Suta Maryan	M	DISPM DUKCAPIL PROVINSI BALI	KABID PUEM DAN KP
44	IBKA Ludra	M	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK PROV.BALI	KABID IKP
45	Irene Bouwmesteer	F	SIAP SIAGA	Head of Operation and Finance
46	Irland Fardani	M	DFAT	GIS
47	Jo Matthews	F	CMM Translation	Interpreter
48	Johny Rohi	M	Dinas Pariwisata NTT	Kepala Bidang Destinasi
49	Juanita Theodora	F	Siap Siaga	DRM Area Coordinator
50	Kamaruddin Rimba	M	SIAP SIAGA	Monitoring Officer for SIAP SIAGA Sub-National
51	Kimora	M	Yayasan Gaya Dewata	Koordinator Lapangan Denpasar
52	Krisdianto Siahaan	M	SIAP SIAGA	IT Architecture/System Analyst
53	Kristanto Sinandang	M	SIAP SIAGA	consultant
54	Kristoforus Sega	M	DINAS PMD PROVINSI NTT	FUNGSIONAL UMUM
55	Loui Thenu	M	SIAP SIAGA	Comms Adviser
56	Lucy Dickinson	F	SIAP SIAGA	Team Leader
57	M. Ali Yusuf	M	LPBI NU	Ketua
58	Maria Filiana Tahu	F	YABIKU NTT	Director
59	Melissa Laik	F	SIAP SIAGA	Admin and Finance Assistant
60	Mia Marina	F	SIAP SIAGA	DRM Adviser
61	Mohammad Kundori	M	Ademos konsorsium PDTC	Ketua Ademos
62	Muliani, S.T	F	BAPPEDA PROVINSI JATIM	STAF SUBBID INFRASTRUKTUR KECIPTAKARYAAN DAN KEWILAYAHAN
63	Muliawan Hasrina	F	SIAP SIAGA	Accountability and Learning Officer
64	Ni Nyoman Sateri	F	Dinas Sosial, P3A Provinsi Bali	Kasi PSKBA
65	Niken Putri Utami Os	F	ADRA Indonesia	Program Officer
66	Nursyamsu	M	Ditjen Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial RI	Bag Program & Pelaporan Setditjen Penanganan Fakir Miskin
67	Olivia Fei Fei	F	DFAT	Program Manager
68	Rahmawati Husein	F	MDMC	Wakil Ketua
69	Renza Furqon	M	BNPB	Policy Analyst
70	Ririe panjaitan	F	Australian Embassy	SPM

No	Name	Sex	Institution	Position
71	Risa Yudhiana	F	SIAP SIAGA	GESI Adviser
72	Selvister Ndaparoka	M	SIAP SIAGA	Program Policy Officer di NTT
73	Shahnaz Balqis	F	SIAP SIAGA	Associate Consulting
74	Sharon Hicks	F	RedR Australia	Director Strategy and Impact
75	Simon Field	M	SIAP SIAGA	Interim Team Leader & International DRM Adviser
76	Sulistyo	M	MDMC PP Muhammadiyah	Staff Program
77	Sunarti	F	Ditjen Linjamsos Kemensos RI	Direktur PSKBS
78	Syaifur Rahmah	F	SIAP SIAGA	Office Manager
79	Teresa Sari	F	SIAP SIAGA	Manager
80	Titok Hariyanto	M	Konsorsium PDTC - Ademos	Project Manager
81	Tri Budiardjo	M	Yayasan RedR Indonesia	Deputy Director
82	Ubaidillah	M	LPBI NU	Wakil Sekretaris
83	Valentinus Irawan	M	SIAP SIAGA	Head of System Strengthening at BNPB
84	Wicaksono	M	BNPB	
85	Wiwandari Handayani (Wiwiek)	F	Universitas Diponegoro	Koordinator Research Center of Urban and Regional Resilience (CURE)
86	Wiwit Prasetyono	M	RedR Indonesia	Training Coordinator: Focal Point SIAP SIAGA Project
87	Yayah Ruchyati	F	LPBI NU	Direktur Program PKMM/sekretaris LPBI NU
88	Yuniandono Achmad	M	SIAP SIAGA	consultant
89	Zuliati	F	LPBI NU	PM. Advokasi & Kelembagaan

Annex 3: Materi Presentasi

Presentasi Hasil SIAP SIAGA 2020



1



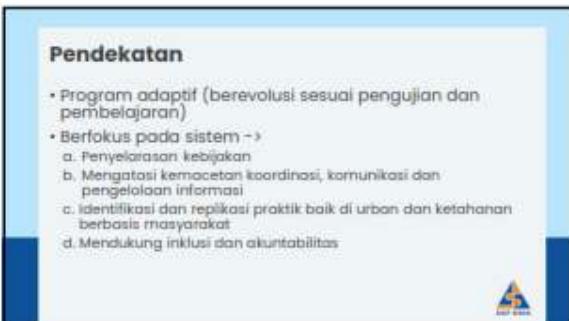
2



3



4



5



6



7

Rencana Kerja 2020		
1. Mempersiapkan sistem pengelolaan risiko bencana	3 aktivitas	<ul style="list-style-type: none"> • Alur komunikasi • Koalisi/gaian • Pemantauan MSS
2. Peringkatkan strategi untuk memberdayakan pemerintah yang Tangguh dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat	6 aktivitas	<ul style="list-style-type: none"> • Gender dan inklusi sosial • Mendukung pelaporan SFDRR • Program tangguh (rumah tangga, CDRM dan kota) • Kohesivasi regional Indonesia/Australia
3. Analisa risiko dan ketahanan menghadapi pengembangan keputusan yang lebih baik di daerah rawan bencana	2 aktivitas	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan analisa risiko untuk mendukung pengambilan keputusan (tingkat sub-nasional) • Ketahanan ekonomi di daerah akhirat
4. Mendukung respon dan pemulihan saat bencana	3 aktivitas	<ul style="list-style-type: none"> • Mendukung respon nasional • Mendukung respon sub-nasional • Mendukung pemulihan

8



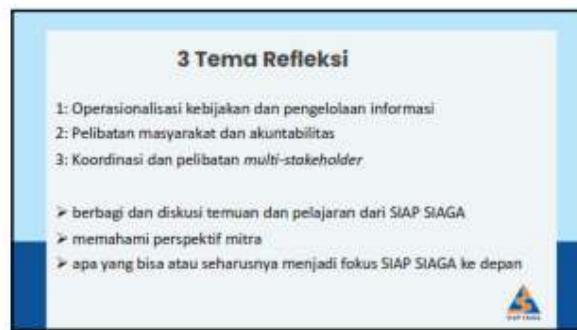
9



10



11



12

Slide Presentasi Sambutan Pembukaan dari Kementerian Dalam Negeri :

